



Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 mampu merespons isu-isu krusial secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Melalui integrasi KLHS ke dalam proses penyusunan Renstra, diharapkan arah pembangunan daerah tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan wilayah, dan memperkuat fondasi Sumatera Selatan menuju pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2.5. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

1. Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
2. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup (KLHS).

Bappeda merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan- kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah yang diharapkan mampu menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang kemudian teridentifikasi sebagai isu strategis dalam bidang perencanaan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan	Pembangunan berkelanjutan belum semuanya terintegrasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan	Belum Tercapainya Program SDG's Dan Transisi Energi Dalam Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Perubahan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Belum Berdampak Pada Daerah	Belum Optimalnya Kerjasama Perencanaan Pembangunan antar Wilayah	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah



	Pembangunan Daerah	di tingkat daerah				
	3. Belum optimalnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja					
	4. Belum optimalnya tata kelola organisasi					

Berdasarkan analisis tersebut, maka isu strategis yang perlu ditangani Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025–2029.

Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” yang didukung oleh indikator tujuan yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Selanjutnya, sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Bappeda

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana dalam Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Ket.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan Perubahan RPJPD/RPJMD	Meningkatnya Kualitas Perencanaaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96,51	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,30	97,35	97,40	97,45	97,50	97,55	97,60	
Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
			2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50	
Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
			4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi			5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah	Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	



1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran ini diukur melalui “Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah”. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga responsif terhadap kondisi faktual dan kebutuhan nyata di daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik kualitas dokumen perencanaan tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan. Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diakomodir Prioritas Daerah}}{\text{Total Isu Strategis}} \times 100$$

2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dan nasional menjadi krusial untuk menciptakan kesinambungan pembangunan, tingginya tingkat keselarasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerjemahkan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan di tingkat daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat keterpaduan program lintas sektor dan wilayah. Sasaran ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Selaras dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$

- b. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Diakomodasi dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$



- c. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Makro pada RPJMD}}{\text{Target Makro RKPD}} \times 100$$

- d. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target IKK pada RPJMD Per Urusan}}{\text{Target IKU Renstra PD}} \times 100$$

- e. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Kinerja Program pada RKPD}}{\text{Target Indikator Program di Renja PD}} \times 100$$

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi antara perencanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah menjadi tolok ukur penting efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hal ini diukur dengan Indikator “persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja perangkat daerah”. Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan bahwa dokumen perencanaan benar-benar diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai acuan kinerja, indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang Dijadikan Target/Sasaran Perangkat Daerah}}{\text{Total Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah}} \times 100$$

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda

Sebagai lembaga perencana daerah, Bappeda memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola organisasi Bappeda diukur melalui “Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah”. Indikator ini mencerminkan seberapa baik Bappeda mendukung kebutuhan perencanaan perangkat daerah lainnya, baik dari sisi data, fasilitasi, maupun koordinasi.



3.2 Strategi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan dan Konsolidasi data dan informasi sebagai dasar perencanaan Daerah Berbasis digital	Penyelarasan sistem dan standar perencanaan melalui Aplikasi	Penguatan Digitalisasi perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)	Monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah melalui sistem aplikasi yang terintegrasi	Pemantapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Digitalisasi Pelayanan Publik
Penyiapan sistem database Perencanaan Pembangunan Daerah terpadu	Pengawasan dan Pembinaan SDM Perencana dalam mengelola sistem aplikasi perencanaan daerah secara berkala	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data spasial dan tematik yang dapat diakses melalui website pemda	Integrasi aplikasi Monitoring dan Evaluasi pada sistem perencanaan daerah	Integrasi sistem perencanaan dengan pelayanan publik berbasis digital
Pemetaan dan inventarisasi data sektoral dan spasial dari seluruh OPD Secara Berkala	Penyusunan SOP teknis perencanaan berbasis digital	Pemuktahiran data lintas sektor dan wilayah yang terintegrasi	Penyajian dan penggunaan dashboard kinerja pembangunan sebagai bahan Monev	Partisipasi publik melalui platform digital
Konsolidasi Standarisasi metadata pembangunan	Penyelarasan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Nasional Berbasis Digital	Penguatan Konsep Holistik Perencanaan Berbasis Digital	Penyusunan laporan kinerja pembangunan sistematis periodik	Penetapan grand desain roadmap Digitalisasi Perencanaan pembangunan daerah berbasis kolaborasi multipihak
Penguatan kapasitas SDM dalam manajemen data	Updating Penguatan Data pada Peningkatan Kapasitas SDM	Optimalisasi Rencana Pendanaan Pembangunan yang Integratif Berbasis Digital	Penguatan Evaluasi Pembangunan Berbasis Digital	Pemanatapan SDM pengelolaan Aplikasi Digital Perencanaan Pembangunan Daerah